BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang memiliki peranan penting dalam kegiatan ekonomi karena berfungsi menggerakkan proses produksi barang dan jasa. Dalam konteks pembangunan ekonomi daerah, tenaga kerja menjadi unsur utama dalam menciptakan output, meningkatkan produktivitas, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Ketersediaan tenaga kerja yang berkualitas akan mempermudah proses industrialisasi dan memperluas kesempatan kerja. Sebaliknya, apabila jumlah tenaga kerja terus meningkat tanpa diimbangi penciptaan lapangan pekerjaan, maka dapat menimbulkan pengangguran. Menurut Mulyadi (2014), tenaga kerja adalah penduduk dalam usia kerja yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa.

Menurut Payaman Simanjuntak (2001), tenaga kerja adalah penduduk yang sudah bekerja, sedang mencari pekerjaan, serta mereka yang melakukan kegiatan lain seperti sekolah dan mengurus rumah tangga tetapi sewaktu-waktu dapat masuk ke pasar kerja. Definisi tersebut menunjukkan bahwa tenaga kerja tidak hanya mencakup orang yang sedang bekerja, tetapi juga mereka yang siap memasuki pasar kerja. Dalam konteks penelitian ini, peningkatan jumlah tenaga kerja di

kabupaten/kota Jawa Barat harus diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja agar tidak meningkatkan tingkat pengangguran terbuka.

Namun, untuk memahami bagaimana tenaga kerja terserap dalam pasar kerja, diperlukan penjelasan lebih lanjut mengenai mekanisme yang menentukan jumlah tenaga kerja yang digunakan dan jumlah tenaga kerja yang tersedia. Mekanisme tersebut dijelaskan melalui teori permintaan dan penawaran tenaga kerja, yang menerangkan interaksi antara kebutuhan perusahaan terhadap pekerja dan kesediaan masyarakat untuk bekerja pada tingkat upah tertentu.

- Permintaan Tenaga Kerja

Permintaan tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan perusahaan pada tingkat upah tertentu. Dalam teori ekonomi mikro, permintaan tenaga kerja bersifat turunan *(derived demand)*, artinya kebutuhan tenaga kerja muncul karena adanya permintaan terhadap barang dan jasa yang diproduksi perusahaan. Jika permintaan produk meningkat, maka perusahaan akan menambah kapasitas produksi dan merekrut tenaga kerja tambahan.

Menurut Sadono Sukirno (2010), permintaan tenaga kerja dipengaruhi oleh tingkat upah, produktivitas pekerja, teknologi, serta permintaan output. Semakin tinggi tingkat upah, cenderung semakin rendah jumlah tenaga kerja yang diminta perusahaan, ceteris paribus. Oleh karena itu, perubahan kebijakan upah minimum dapat memengaruhi jumlah tenaga kerja yang diserap perusahaan.

- Penawaran Tenaga Kerja

Penawaran tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang bersedia bekerja pada berbagai tingkat upah. Penawaran tenaga kerja berasal dari rumah tangga atau individu yang menawarkan waktu dan keahliannya untuk memperoleh pendapatan. Faktor-faktor yang memengaruhi penawaran tenaga kerja antara lain jumlah penduduk, tingkat pendidikan, struktur umur, partisipasi angkatan kerja, dan tingkat upah.

Menurut Payaman Simanjuntak (2001), penawaran tenaga kerja dipengaruhi oleh jumlah penduduk usia kerja dan tingkat partisipasi angkatan kerja. Jika pertumbuhan penduduk tinggi namun penciptaan lapangan kerja rendah, maka akan meningkatkan jumlah pengangguran.

2.1.2 Teori Pengangguran

Pengangguran merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kinerja perekonomian suatu wilayah. Secara umum, pengangguran adalah kondisi dimana seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan namun sedang aktif mencari pekerjaan. Menurut (Sadono Sukirno, 2010) pengangguran adalah keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya.

Secara teoritis, pengangguran dapat dijelaskan melalui pendekatan klasik dan Keynesian. Teori klasik berpendapat bahwa pasar tenaga kerja akan mencapai keseimbangan melalui mekanisme upah, sehingga pengangguran bersifat sementara. Namun, dalam pandangan Keynesian, pengangguran dapat terjadi dalam jangka panjang akibat kurangnya permintaan agregat. Hal ini diperkuat oleh (N.

Gregory Mankiw, 2021) yang menyatakan bahwa pengangguran muncul karena ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja.

Pengangguran dapat diklasifikasikan berdasarkan penyebab dan karakteristiknya menjadi beberapa jenis, yaitu :

Menurut N. Gregory Mankiw (2018), pengangguran dibedakan menjadi:

1. Pengangguran Friksional, yaitu pengangguran sementara karena perpindahan kerja atau pencarian pekerjaan baru.
2. Pengangguran Struktural, yaitu pengangguran akibat ketidaksesuaian keterampilan dengan kebutuhan industri.
3. Pengangguran Siklikal, yaitu pengangguran akibat perlambatan ekonomi.
4. Pengangguran Musiman, yaitu pengangguran yang dipengaruhi musim usaha tertentu.

Selain itu, pengangguran terbuka merupakan jenis pengangguran yang paling sering digunakan dalam analisis makroekonomi karena mencerminkan ketidakseimbangan antara jumlah tenaga kerja dan kesempatan kerja yang tersedia. Dalam konteks pembangunan daerah seperti Provinsi Jawa Barat, pengangguran terbuka seringkali dipengaruhi oleh pertumbuhan industri dan dinamika pasar tenaga kerja regional (BPS, 2023).

Menurut Badan Pusat Statistik, pengangguran terbuka adalah penduduk yang telah masuk dalam angkatan kerja tetapi tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, serta sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja (Badan Pusat Statistik, 2024).

Rumus Tingkat Pengangguran Terbuka:

$$\boldsymbol{TPT = \frac{JP}{JAK} X100\%}$$

Keterangan:

TPT : Tingkat Pengangguran Terbuka

JP : Jumlah Pengangguran

JAK : Jumlah Angkatan Kerja

2.1.3 Teori Upah Minimum

Upah minimum merupakan kebijakan pemerintah yang menetapkan batas upah terendah yang wajib dibayarkan oleh perusahaan kepada pekerja guna menjamin terpenuhinya standar hidup layak. Dalam perspektif kelembagaan, kebijakan upah minimum bertujuan untuk melindungi pekerja dari eksploitasi upah dan memperbaiki distribusi pendapatan. International Labour Organization (ILO, 2021) mendefinisikan upah minimum sebagai tingkat upah terendah yang dapat dibayarkan secara sah kepada pekerja dalam periode tertentu, yang bertujuan untuk menjamin standar hidup minimum dan melindungi tenaga kerja dari upah yang terlalu rendah. Dengan demikian, kebijakan upah minimum tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan moral dalam pembangunan ketenagakerjaan

Dalam perspektif teori ekonomi klasik, upah minimum dapat memiliki hubungan positif dengan tingkat pengangguran apabila ditetapkan di atas tingkat upah keseimbangan pasar. Menurut Mankiw (2022), ketika pemerintah menetapkan upah minimum di atas tingkat upah keseimbangan, jumlah tenaga kerja yang

ditawarkan akan melebihi jumlah tenaga kerja yang diminta oleh perusahaan. Kondisi tersebut menciptakan surplus tenaga kerja yang dapat menyebabkan pengangguran. Dengan demikian, semakin tinggi upah minimum yang ditetapkan di atas tingkat keseimbangan pasar, semakin besar kemungkinan perusahaan mengurangi permintaan tenaga kerja sehingga tingkat pengangguran dapat meningkat.

Secara ekonomi, peningkatan upah minimum akan meningkatkan biaya tenaga kerja yang harus ditanggung oleh perusahaan. Untuk menyesuaikan peningkatan biaya tersebut, perusahaan dapat mengurangi jumlah pekerja, membatasi perekrutan tenaga kerja baru, atau menggantikan sebagian tenaga kerja dengan teknologi dan mesin. Oleh karena itu, kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) berpotensi meningkatkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), terutama pada sektor padat karya yang memiliki proporsi biaya tenaga kerja yang besar. Pandangan ini juga sejalan dengan teori neoklasik yang menjelaskan bahwa kenaikan upah minimum dapat menurunkan permintaan tenaga kerja karena pekerja menjadi lebih mahal bagi perusahaan.

sehubungan dengan hal itu upah yang diterima pekerja dapat dibedakan dua macam yaitu: Upah Nominal, yaitu sejumlah upah yang dinyatakan dalam bentuk uang yang diterima secara rutin oleh para pekerja, Upah Riil adalah kemampuan upah nominal yang diterima oleh para pekerja jika ditukarkan dengan barang dan jasa, yang diukur berdasarkan banyaknya barang dan jasa yang bisa didapatkan dari pertukaran tersebut (Sukirno, 2008).

2.1.4 Industri Pengolahan

Industri pengolahan adalah sektor ekonomi yang mengubah bahan mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi yang memiliki nilai tambah. Menurut (Badan Pusat Statistik, 2023) industri pengolahan mencakup seluruh kegiatan ekonomi yang melakukan proses transformasi bahan menjadi produk baru yang bernilai ekonomi lebih tinggi. Sektor ini merupakan salah satu sektor utama dalam perekonomian Indonesia.

Dalam teori pembangunan ekonomi, industrialisasi merupakan tahap penting dalam transformasi struktural suatu negara (Todaro & Smith, 2020) menjelaskan bahwa pertumbuhan sektor industri akan mendorong peralihan tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri yang lebih produktif. Hal ini tidak hanya meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga memperluas kesempatan kerja. Selain itu, peningkatan jumlah industri pengolahan akan menciptakan efek multiplier dalam perekonomian. Kehadiran industri baru tidak hanya menyerap tenaga kerja secara langsung, tetapi juga mendorong pertumbuhan sektor lain seperti perdagangan, transportasi, dan jasa. Dengan demikian, semakin banyak industri yang berkembang, semakin besar pula peluang kerja yang tersedia, sehingga dapat menurunkan tingkat pengangguran.

Dalam pengukuran ekonomi daerah, perkembangan industri pengolahan dapat dilihat melalui kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB sektor industri pengolahan menunjukkan besarnya nilai tambah yang dihasilkan sektor industri dalam suatu wilayah selama periode tertentu. Semakin tinggi nilai PDRB industri pengolahan, maka semakin besar kontribusi

sektor industri terhadap perekonomian daerah. Menurut (Sadono Sukirno, 2010) peningkatan output sektor industri yang tercermin dalam pertumbuhan PDRB akan mendorong peningkatan produksi dan permintaan tenaga kerja sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran.

PDRB industri pengolahan juga mencerminkan tingkat aktivitas ekonomi dan kapasitas produksi suatu daerah. Daerah dengan nilai PDRB industri pengolahan tinggi umumnya memiliki konsentrasi industri yang besar, infrastruktur yang lebih baik, serta tingkat investasi yang tinggi. Kondisi tersebut akan menciptakan peluang kerja yang lebih luas dibanding daerah dengan aktivitas industri rendah. Oleh karena itu, sektor industri pengolahan sering dianggap sebagai sektor unggulan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

Dalam konteks daerah seperti Jawa Barat, peningkatan jumlah industri pengolahan dapat menjadi faktor penting dalam menurunkan tingkat pengangguran terbuka. Hal ini karena industri pengolahan merupakan salah satu sektor unggulan yang memiliki kontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja.

2.1.5 Teori Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Menurut Kuznets (1973), pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kemampuan jangka panjang suatu negara dalam menyediakan berbagai barang dan jasa kepada masyarakat. Pertumbuhan ini biasanya diukur melalui peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Dalam teori makroekonomi, pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang erat dengan penyerapan tenaga kerja. Ketika perekonomian tumbuh, produksi

barang dan jasa meningkat sehingga perusahaan membutuhkan lebih banyak tenaga kerja. Hal ini menyebabkan peningkatan permintaan tenaga kerja yang pada akhirnya menurunkan tingkat pengangguran. (Mankiw, 2022).

Hubungan tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam Hukum Okun yang dikemukakan oleh (Okun, 1962). Hukum ini menyatakan bahwa terdapat hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran, di mana peningkatan pertumbuhan ekonomi di atas tingkat normalnya akan menurunkan tingkat pengangguran.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dari sejumlah jurnal dan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya berfungsi sebagai gambaran dan pembanding yang dapat didukung oleh kegiatan penelitian dan sebagai sumber informasi untuk mengetahui sejauh mana hubungan antar variabel penelitian memiliki dampak. Berikut merupakan ringkasan dari penelitian terdahulu yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Lisa Marliana : Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia	X1:IPM, X2: Pertumbuhan Ekonomi, X3: Upah Minimum, Y:Tingkat Pengangguran Terbuka	hasil regresi liner berganda, yaitu uji F hitung secara simultan indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi dan upah minimum bersama-sama mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Indonesia. Sedangkan berdasarkan uji T secara parsial indeks pembangunan manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka, pertumbuhan ekonomi dan upah minimum berpengaruh signifikan

No	Nama dan Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
			terhadap tingkat pengangguran terbuka.
2.	‘Ainun Hanum Salsabila, Agisva Elvatikha Rahmatillah, Damai Arwansa : Dampak upah minimum, IPM, dan TPAK terhadap pengangguran (Jawa Tengah)	X1:Upah Minimum X2: IPM X3:TPAK, Y: Pengangguran	Upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran, artinya kenaikan UMK cenderung meningkatkan pengangguran. IPM berpengaruh negatif signifikan, menunjukkan peningkatan kualitas SDM menurunkan pengangguran. TPAK berpengaruh positif signifikan, karena peningkatan jumlah angkatan kerja tidak diimbangi penyerapan tenaga kerja.
3.	Dewi Rizkita, Muna Ziadatul Maghfiroh, Serli Adetia, Idris Nopri Darmansyah, dan Mhd. Subhan. Analisis Pengaruh Pendidikan, Upah Minimum, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Pengangguran di Indonesia	X1: Pendidikan, X2: Upah Minimum, X3: Pertumbuhan Ekonomi Y: Tingkat Pengangguran	Pendidikan berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat pengangguran, upah minimum berpengaruh positif namun tidak signifikan, sementara pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif signifikan terhadap pengangguran.
4.	Akmal Abdul Aziz & Aan Julia : Pengaruh jumlah industri, UMK, dan pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran di Jawa Barat 2017–2020	X1:Jumlah Industri,X2:UMK X3: Pertumbuhan Ekonomi, Y: Pengangguran	Jumlah industri berpengaruh negatif signifikan terhadap pengangguran, artinya peningkatan industri menurunkan pengangguran. Upah minimum berpengaruh positif signifikan, menunjukkan kenaikan UMK meningkatkan pengangguran. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif signifikan, menandakan peningkatan ekonomi menurunkan pengangguran.
5.	Ade Mulya Pratomo & Andryan Setyadharma: The Effect of Wages, Economic Growth, and Number of Industries on Unemployment	X1: Upah Minimum, X2: Pertumbuhan Ekonomi, X3:Jumlah Industri, Y: Pengangguran	Upah berpengaruh positif signifikan terhadap pengangguran, menunjukkan kenaikan upah meningkatkan pengangguran. Jumlah industri berpengaruh negatif signifikan, artinya peningkatan industri menurunkan pengangguran. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif signifikan, menurunkan pengangguran melalui peningkatan aktivitas ekonomi.

No	Nama dan Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
6.	Romy Rizki Hasbianur, José Agustín, Didi Sukardi : The Influence of Provincial Minimum Wages and Population on TPT of West Java	X1: Upah Minimum, X2:Jumlah Penduduk Y: Pengangguran Terbuka	Upah minimum berpengaruh positif signifikan terhadap TPT, menunjukkan kenaikan upah meningkatkan pengangguran terbuka. Jumlah penduduk berpengaruh positif signifikan, karena peningkatan populasi meningkatkan tekanan di pasar kerja.
7.	Qatrunnada Nisrina Ramadhani & Candra Fajri Ananda : Pengaruh pertumbuhan ekonomi, investasi, dan UMK terhadap pengangguran di Jawa Barat	X1: Pertumbuhan Ekonomi X2: Investasi, X3:UMK Y: Pengangguran	Pertumbuhan ekonomi dan investasi berpengaruh negatif signifikan, menurunkan pengangguran melalui penciptaan lapangan kerja. Upah minimum berpengaruh positif signifikan, meningkatkan pengangguran.
8.	Shinta Ulan Guritno, Sri Muljaningsih: Pengaruh pendidikan, upah minimum dan kesempatan kerja terhadap pengangguran terdidik di jawa barat	X1: Pendidikan, X2:Upah Minimum, X3: Kesempatan Kerja Y: Pengangguran	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pengangguran terdidik di Jawa Barat, upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran terdidik di Jawa Barat, dan kesempatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran terdidik di Jawa Barat.
9.	Reza Nanda Nugraha : Pengaruh PDRB dan UMK terhadap pengangguran di Jawa Barat 2017–2021	X1: PDRB, X2: UMK, Y:Pengangguran	PDRB berpengaruh negatif signifikan terhadap pengangguran, sedangkan UMK berpengaruh positif signifikan, menunjukkan kenaikan upah meningkatkan pengangguran
10.	Santi Fitria Andriani & Westi Riani : Pengaruh pertumbuhan ekonomi, UMK dan IPM terhadap	X1:Pertumbuhan Ekonomi, X2: UMK, X3: IPM, Y: Pengangguran	Pertumbuhan ekonomi dan IPM berpengaruh negatif signifikan, menurunkan pengangguran. Upah minimum berpengaruh positif signifikan, meningkatkan pengangguran.

No	Nama dan Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
	pengangguran 2000–2020		

2.3 Kerangka Pemikiran

Upah minimum merupakan salah satu instrumen kebijakan pemerintah dalam pasar tenaga kerja yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja melalui penetapan batas upah terendah yang harus diterima oleh tenaga kerja. Menurut International Labour Organization (ILO, 2021), upah minimum merupakan tingkat upah terendah yang ditetapkan secara hukum dan wajib diberikan kepada pekerja dengan tujuan menjamin standar kehidupan yang layak serta melindungi tenaga kerja dari pemberian upah yang terlalu rendah.

Dalam perspektif teori ekonomi klasik, upah minimum dapat memiliki hubungan positif dengan tingkat pengangguran apabila ditetapkan di atas tingkat upah keseimbangan pasar. Menurut Mankiw (2022), ketika pemerintah menetapkan upah minimum di atas tingkat upah keseimbangan, jumlah tenaga kerja yang ditawarkan akan melebihi jumlah tenaga kerja yang diminta oleh perusahaan. Kondisi tersebut menciptakan surplus tenaga kerja yang dapat menyebabkan pengangguran. Dengan demikian, semakin tinggi upah minimum yang ditetapkan di atas tingkat keseimbangan pasar, semakin besar kemungkinan perusahaan mengurangi permintaan tenaga kerja sehingga tingkat pengangguran dapat meningkat.

Industri pengolahan merupakan sektor strategis dalam pembangunan ekonomi daerah karena mampu menciptakan nilai tambah, meningkatkan output, serta

menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Bertambahnya jumlah industri pengolahan di suatu wilayah akan memperluas kesempatan kerja sehingga masyarakat yang sebelumnya menganggur memiliki peluang lebih besar untuk bekerja. Dengan demikian, peningkatan jumlah industri pengolahan diduga berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran terbuka.

Dalam pengukuran ekonomi daerah, perkembangan industri pengolahan dapat dilihat melalui kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB sektor industri pengolahan menunjukkan besarnya nilai tambah yang dihasilkan sektor industri dalam suatu wilayah selama periode tertentu. Semakin tinggi nilai PDRB industri pengolahan, maka semakin besar kontribusi sektor industri terhadap perekonomian daerah. Menurut (Sadono Sukirno, (2010) peningkatan output sektor industri yang tercermin dalam pertumbuhan PDRB akan mendorong peningkatan produksi dan permintaan tenaga kerja sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran.

Pertumbuhan ekonomi mencerminkan peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa di suatu daerah. Ketika perekonomian tumbuh, permintaan terhadap tenaga kerja cenderung meningkat karena perusahaan melakukan ekspansi usaha dan menambah kapasitas produksi. Kondisi ini akan menurunkan tingkat pengangguran terbuka. Sebaliknya, perlambatan ekonomi dapat menekan produksi dan mengurangi penyerapan tenaga kerja.

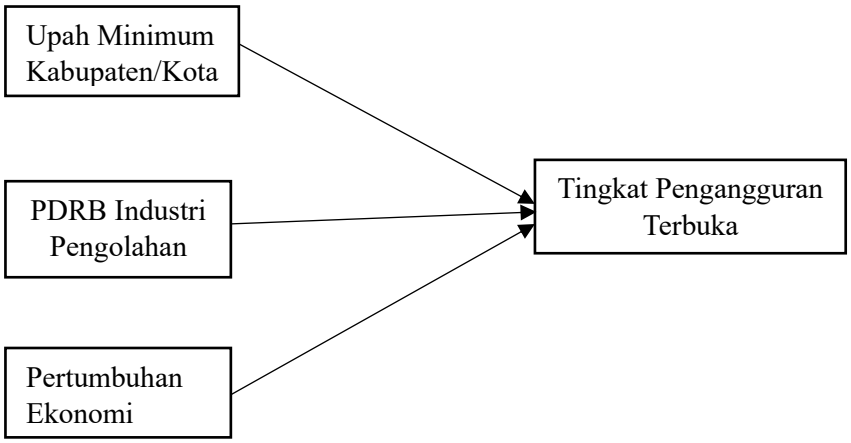
Menurut Arthur Okun (1962), terdapat hubungan negatif antara pertumbuhan output dan pengangguran, yang dikenal sebagai *Okun's Law.* Teori ini menjelaskan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi akan diikuti penurunan tingkat

pengangguran. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Barat diduga berpengaruh negatif terhadap TPT.

Secara simultan, ketiga variabel independen tersebut memiliki keterkaitan erat terhadap kondisi ketenagakerjaan daerah. Upah minimum memengaruhi biaya tenaga kerja dan kesejahteraan pekerja, jumlah industri pengolahan mencerminkan kapasitas penciptaan lapangan kerja, sedangkan pertumbuhan ekonomi menunjukkan kemampuan daerah dalam memperluas kegiatan ekonomi. Kombinasi ketiga faktor tersebut diyakini menentukan tinggi rendahnya tingkat pengangguran terbuka pada kabupaten/kota di Jawa Barat.

Menurut Sadono Sukirno (2010), pengangguran dipengaruhi oleh ketidakseimbangan antara pertumbuhan angkatan kerja dengan kemampuan perekonomian menciptakan kesempatan kerja. Oleh sebab itu, kebijakan upah, pengembangan industri, dan pertumbuhan ekonomi merupakan instrumen penting dalam menurunkan pengangguran.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dijelaskan bahwa Upah Minimum Kabupaten/Kota, PDRB Industri Pengolahan, dan Pertumbuhan Ekonomi memiliki hubungan negatif terhadap tingkat pengangguran terbuka. Peningkatan upah minimum yang mampu meningkatkan produktivitas dan daya beli pekerja akan mendorong aktivitas ekonomi serta memperbesar kesempatan kerja. Sementara itu, peningkatan PDRB industri pengolahan dan pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan kapasitas produksi serta permintaan tenaga kerja. Dengan demikian, ketiga variabel tersebut secara teoritis diperkirakan mampu menurunkan tingkat pengangguran terbuka.



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan sementara terhadap jawaban atas permasalahan penelitian yang masih harus dibuktikan kebenarannya melalui pengujian secara empiris. Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka pemikiran yang telah diuraikan, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diduga Upah minimum kabupaten/kota berpengaruh positif terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Barat.
2. Diduga PDRB industri pengolahan berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Barat.
3. Diduga Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Barat.

Dengan demikian, secara simultan diduga Upah Minimum Kabupaten/Kota, PDRB Industri Pengolahan dan Pertumbuhan Ekonomi mempunyai pengaruh

signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2024.